

STUDI TENTANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) Di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu

Damianus Ding¹

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu yaitu kegiatan di bidang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan kegiatan di bidang Pembangunan atau Perbaikan Prasarana dan Sarana maupun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PNPM-MP di Desa Noha Boan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum efektivitas pelaksanaan PNPM-MP di Desa Noha Boan secara khusus program simpan pinjam perempuan (SPP) belum cukup efektif, hal ini masih dibuktikan dengan masih adanya keterlambatan dalam pengembalian dana pinjaman atau pinjaman bergulir, sedangkan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sudah cukup efektif, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sejumlah pembangunan prasarana seperti: semenisasi jalan gang, saluran air bersih, saluran drainase, dan tangga tepian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PNPM-MP di Desa Noha Boan adalah Faktor Pendukung dan faktor penghambat, adapun faktor pendukungnya adalah partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program dengan tingkat antusias yang tinggi. Sedangkan faktor penghambat yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang menghambat tingkat pengetahuan masyarakat terhadap tujuan dari program PNPM-MP.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelaksanaan, PNPM-MP

Pendahuluan

Dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka desa sudah sepatutnya memiliki hak untuk mendapatkan pembiayaan berupa anggaran guna melaksanakan kewenangan tersebut dan sekaligus untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Pentingnya pemberian anggaran kepada desa ini dilakukan mengingat bahwa, pemerintah desa tidak akan dapat

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: damianusding@gmail.com

melaksanakan kewenangan dan fungsinya dengan efektif tanpa biaya yang cukup. Selama ini pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya sangat relatif kecil dan tidak dapat diprediksikan keberadaannya. Hal ini yang kemudian akan menjadikan pembangunan desa pada umumnya relatif terkesan sangat lambat dan belum berjalan secara optimal.

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan program pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat memberdayakan masyarakat miskin dalam arti memandirikan dan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam memperoleh hak-hak ekonomi, sosial dan politik serta mengontrol keputusan –keputusan yang menyangkut kepentingannya baik dalam hal menyalurkan aspirasi, mengidentifikasi masalah maupun kebutuhan- kebutuhannya sendiri. Melalui PNPM-Mandiri Perdesaan diharapkan adanya perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat miskin serta mampu untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan proses pelibatan diri secara penuh pada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama dimana tiap pihak yang berkepentingan/ terlibat (pemerintah, pemodal dan masyarakat) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dan pembangunan (Hery Budiyanto, 2011).

PNPM-Mandiri Perdesaan memiliki target untuk menanggulangi jumlah penduduk miskin pada wilayah yang menjadi target sasaran. Dalam PNPM-Mandiri Perdesaan ada empat kelompok program kegiatan yang dikembangkan yaitu meliputi : (1) kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, (2) peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat, (3) kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal, (4) penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).

Salah satu daerah yang menjadi sasaran PNPM-MP dalam memberdayakan masyarakat adalah Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan kehadiran PNPM-MP kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki diharapkan akan semakin baik sehingga berpengaruh pula terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Namun dalam pelaksanaan PNPM-MP secara umum masalah yang sering terjadi yang menyebabkan pelaksanaan PNPM-MP tidak berjalan dengan baik yakni, adanya kendala pada pelaksanaannya yang belum sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

Bertolak dari uraian pada latar belakang tersebut, dan untuk mengetahui secara mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan pokok yang akan dikaji yaitu : Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu?

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu. Yaitu: Program kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Program kegiatan pembangunan prasarana dan sarana. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi: Faktor penghambat dan Faktor pendukung.

Kerangka Dasar Teori

Efektivitas

Suatu organisasi secara keseluruhannya dalam kaitannya dengan efektivitas adalah mencapai tujuan organisasi. Jika tiap-tiap individu berperilaku atau bekerja efektif dalam mencapai tujuannya, maka kelompok dimana ia menjadi anggota juga efektif dalam mencapai tujuan, organisasi itu juga efektif mencapai tujuan. Efektivitas berbeda dengan efisiensi. Efisiensi adalah pengorbanan untuk mencapai tujuan. Dimana semakin kecil pengorbanannya dalam mencapai tujuan, maka dikatakan semakin efisiensi. Sedangkan Efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan (organisasi) dapat dicapai (Sigit, 2003: 1).

Menurut Dasril Munir dkk, (2004:46), "efektivitas menunjukkan seberapa jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsinya sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan sumber daya yang ada". Selanjutnya masih menurut beliau apabila berbicara tentang efektifitas ada 2

aspek penting yang perlu ditekankan didalamnya yaitu : (1). Tujuan yang akan hendak dicapai. (2). Proses pelaksanaan dengan menggunakan cara, alat dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam efektivitas ada 2 hal penting yang harus diperhatikan yaitu selain tujuan yang ingin dicapai juga bagaimana proses pencapaian tujuan itu dilakukan, proses pencapaian tujuan tentunya dengan menggunakan cara-cara yang benar dalam hal ini adalah cara yang sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang ada didalam ketentuan, sehingga pada seluruh rangkaian kegiatan harus mengacu pada prosedur yang telah diatur pada ketentuan yang berlaku.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan suatu program tersebut berhasil atau tidak. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan (Siagian, 2001: 24)

Kriteria Efektivitas Organisasi

Konsep mengenai efektivitas organisasi selain disandarkan pada teori sistem, tetapi perlu ditambahkan dengan sesuatu yang baru yaitu pada dimensi waktu. Hubungan antara kriteria efektivitas dan dimensi waktu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Produksi
Produksi menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan.
2. Efisiensi
Konsep efisiensi didefinisikan sebagai angka perbandingan antara output dan input. Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan, antara keuntungan dan biaya atau dengan waktu atau output yang merupakan bentuk umum dari ukuran ini.
3. Kepuasan
Konsep kepuasan mendefinisikan penekanan pada perhatian yang menguntungkan bagi anggota organisasi maupun pelanggannya. Artinya bahwa organisasi harus mampu memberikan kepuasan kepada kebutuhan para anggota.
4. Adaptasi
Kemampuan beradaptasi diartikan dengan sampai seberapa organisasi mampu menanggapi perubahan intren dan ekstren. Jika organisasi tidak dapat menyesuaikan diri, maka kelangsungan hidupnya akan terancam, namun adaptasi tidak memiliki ukuran yang pasti dan nyata. Dapat dijelaskan, apabila tiba waktunya untuk

mengadakan penyesuaian dikarenakan adanya fenomena-fenomena tertentu, maka organisasi harus dapat menyesuaikan diri.

5. Perkembangan

Organisasi harus mengembangkan diri agar tetap hidup atau berjaya untuk jangka panjang. Efektivitas dengan pertimbangannya, maka efektivitas dapat dibagi menjadi efektivitas jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Keseimbangan optimal adalah keseimbangan dari pencapaian hubungan yang wajar antara kriteria-kriteria itu dalam periode waktu tertentu (Tampubolon, 2008: 177).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa (Sumodiningrat, 2009 : 60). Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2005 : 60). Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan, tetapi konsep ini berpandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sementara itu Lowe (dalam sumaryadi 2005: 92) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah proses sebagai akibat darimana individu memiliki otonomi, motivasi dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka dalam suatu cara yang memberikan mereka rasa kepemilikan dan kepenuhan bila mana mencapai tujuan bersama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah yang ada pada masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah keterbelakangan dan kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan mengarah pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa fisik ekonomi maupun sosial seperti rasa percaya diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan Masyarakat

Adapun tujuan pemberdayaan pada dasarnya sebagai berikut:

- a). Membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin marjinal dan kaum kecil petani kecil, buruh tani masyarakat kecil perkotaan, masyarakat adat terbelakang, kaum pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan dan dikesampingkan.
- b). Memberdayakan kelompo-kelompok masyarakat tersebut secara sosioekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka namun sanggup berperan serta dalam masyarakat.

Sedangkan sasaran dari program pemberdayaan adalah: Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat dalam mengorganisir diri untuk kemajuan dan kemandirian bersama.

1. Diperbaikinya kondisi sekitar kehidupan kaum renta, tak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, peningkatan pendapatan dan usaha-usaha dibidang ekonomi secara swadaya.
2. Ditingkatkan kemampuan dan kinerja kelompo-kelompok swadaya dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktifitas dan pendapatan mereka.

Indikator Keberdayaan

Menurut Suharto (2005: 126) secara umum Indikator Keberdayaan dapat didefinisikan sebagai alat ukur unjuk menunjukan atau menggambarkan suatu keadaan dari suatu hal yang menjadi pokok perhatian. Menurut schuler. Hashemi dan Riley (dalam suharto 2005: 63-66) adapun indikator pemberdayaan yang dikembangkan sebagai berikut:

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah, ketempat ibadah, pasar, fasilitas medis. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi apabila, setiap individu mampu pergi sendiri.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan dirinya.
3. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier. Seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga.
5. Kemampuan relative dari dominasi.
6. Kesadaran hukum dan politik: minimal mengetahui nama salah seorang dari pegawai kantor kelurahan maupun desa tempat bermukim.

7. Keterlibatan dalam maupun prote-prote: seorang akan dianggap berdaya apabila ia terlibat dalam kampanye.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, memiliki tanah, rumah maupun aset maupun tabungan.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Suharto (2005: 66-67) konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (empowering setting): mikro, mezzo dan makro dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention.
2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidik atau pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.
3. Aras Makro. Pemberdayaan ini sering disebut juga sebagai strategi sistem besar (large-system strategi), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

PNPM-MP adalah Program Nasional untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM-MP merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. (Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP 2008: 1).

Berdasarkan Buku Pedoman Umum PNPM MP Tahun 2008 yang menyatakan bahwa visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah : “Tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan.” Kesejahteraan berarti terpenuhinya dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sedangkan Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2. Kelembagaan sistem pembangunan partisipatif
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar ekonomi masyarakat

5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Anonim (2008) menyatakan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dari pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberkelanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Tujuan PNPM-MP

Tujuan Umum PNPM-MP adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan khususnya meliputi:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan, sumber daya lokal.
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD).
7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Prinsip Dasar PNPM-MP

PNPM Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

1. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
2. Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
3. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
4. Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
5. Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
6. Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
7. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
8. Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
9. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
10. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanganan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kemiskinan.
11. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
12. Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan tentang objek yang diteliti yaitu tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu. Analisis yang dipergunakan adalah Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Adapun teknik analisis data secara keseluruhan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dikutip dari Matthew B. Milles dan Michael Huberman (1992:16-21) mengenai analisis kualitatif terdiri dari tiga jalur yang selalu bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasan kegiatan analisis yaitu : 1). Pengumpul Data, 2). Reduksi Data, 3). Penyajian Data, 4). Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

Hasil Penelitian

Pada bagian ini penulis akan melakukan pembahasan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan salah satu perumusan masalah dalam penelitian ini. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan PNPM-MP penulis akan melakukan pembahasan sesuai dengan data yang didapat berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan pada kantor sekretariat PNPM-MP Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu.

Efektivitas Pelaksanaan PNPM-MP di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilihat dari pengertian PNPM Mandiri yaitu menanggulangi kemiskinan dengan tujuan meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri tidak mungkin diwujudkan secara instan melainkan serangkaian program kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu yang hanya dua program kegiatan yang di canangkan atau terealisasikan diantara empat program kegiatan PNPM-MP yaitu program kegiatan simpan pinjam perempuan dan program kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana. Mengenai pembahasan dari kedua hal tersebut secara rinci dapat dilihat dalam pembahasan sebagai berikut ini :

Program Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan

Berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dilapangan mengenai kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP), kegiatan ini merupakan salah satu wujud dari ruang lingkup dari PNPM-MP yang dibiayai melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang secara umum

tujuan dari simpan pinjam perempuan (SPP) adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan pekerjaan. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan salah satu pilihan dari berbagai alternatif dalam menanggulangi kemiskinan dimana pada prinsipnya pemanfaat dana pinjaman itu sendiri 100% harus keluarga miskinlah yang harus menerima manfaat dari kegiatan SPP. Dana pinjaman diberikan kepada masyarakat miskin untuk membuka usaha mereka tetapi pinjaman tidak langsung diberikan kepada seluruh masyarakat, melainkan masyarakat tersebut harus membuat kelompok swadaya dan siap mengikuti serta mematuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan petunjuk teknis operasional PNPM-MP.

Dalam pelaksanaannya program simpan pinjam khusus perempuan dilaksanakan melalui beberapa tahap sebelum proses pengajuan pinjaman, sebelum mengajukan pinjaman masyarakat penerima manfaat harus bentuk kelompok yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dalam satu kelompok sekurang-kurangnya lima orang atau bisa mencapai 6 orang kemudian dalam satu kelompok mengajukan proposal ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Pelaksanaan Program SPP di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari dilaksanakan melalui beberapa proses tahapan yaitu :

- 1) MAD Sosialisasi dimana pada tahapan ini dilakukan pengenalan awal pada masyarakat desa agar memahami adanya program PNPM Mandiri Perdesaan khususnya SPP agar dapat dimanfaatkan dengan baik.
- 2) Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi sebagai ajang penyebarluasan informasi mengenai PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Desa.
- 3) Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) yaitu dimana di dalamnya dihadiri oleh kaum perempuan yang dilakukan untuk membahas gagasan dari kelompok perempuan dan menetapkan usulan yang merupakan usulan perempuan, dalam tahapan ini juga dilakukan Pengajuan proposal.
- 4) Verifikasi yaitu adalah tahapan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan setiap kelompok yang mengajukan proposal.
- 5) MAD Prioritas Usulan yaitu tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model kompetisi dengan mempertimbangkan hasil verifikasi.
- 6) MAD Penetapan Usulan pada tahap ini keputusan mencakup pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi syarat perangkungan dapat didanai dengan BLM PNPM-MP.
- 7) Pencairan Dana, tahapan ini dilakukan setelah adanya dana dari pusat.
- 8) Pengembalian Dana, yaitu tahapan akhir dari program SPP dimana pada tahap ini dilakukan proses pengangsuran oleh kelompok-kelompok peminjam.

Pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan

No	Nama KSM	Jenis Usulan Kegiatan	Volume (Org)
1	Diting Dajang	Pelatihan pembuatan kue dan pengrajin manik-manik	6
2	Tikang Balong	Usaha Warung makan dan sembako	6

Sumber: Laporan Kegiatan Pemanfaatan BLM PNPM-MP Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat kita ketahui beberapa kegiatan di bidang simpan pinjam perempuan dimana hanya dua kelompok saja yang mengajukan usulan dana pinjaman yaitu kelompok Diting Dajang dengan jenis kegiatan pelatihan pembuatan kue dan pengrajin manik, berbeda dengan Tikang Balong dengan jenis kegiatan membuka usaha kecil seperti warung makan dan sembako. Adapun beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan pinjaman itu disebabkan oleh masyarakat tersebut tidak membentuk kelompok untuk mengajukan usulan sehingga mereka dimasukan kedalam daftar tunggu untuk menunggu atau dimasukan ke tahap berikutnya. Dalam kegiatan SPP ini masyarakat sangat antusias sekali untuk melakukan pinjaman namun akan tetapi banyaknya hambatan salah satunya adalah berkas persyaratan yang terlalu rumit bagi masyarakat sehingga memberatkan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan sejumlah data yang diperoleh dari sejumlah informan telah penulis ketahui bahwa pelaksanaan program kegiatan SPP di Desa Noha Boan sudah cukup efektif dan mampu memberikan dampak positif bagi warga miskin serta mampu memberikan kontribusi dalam pinjaman kepada masyarakat untuk berkesempatan dalam membuka usaha, namun pada realitanya kadang-kadang kegiatan SPP ini mendapatkan kendala dalam pencairan dana maupun dalam proses pengembalian dana oleh masyarakat yang agak terlambat meskipun demikian antusias masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-MP khususnya Kegiatan SPP sudah cukup efektif. Keterlambatan dalam pengembalian dana SPP dikarenakan banyak masyarakat yang masih belum paham serta tingkat pendidikan yang kurang mendukung. Kegiatan ini lebih memfokuskan pada upaya peningkatan pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat, meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan usaha serta keterampilan dalam seni budaya seperti pelatihan pembuatan manik-manik dan lain sebagainya.

Program Kegiatan Pembangunan atau Perbaikan Prasarana dan Sarana

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis dilokasi penelitian bahwa pelaksanaan program kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana yang ada di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari adalah komponen kegiatan yang salah satunya didanai oleh BLM PNPM-MP yang dikelola langsung oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang mempunyai tugas melakukan pendampingan

penyusunan usulan kegiatan yang melibatkan masyarakat serta disertai adanya pengendalian mutu dan pengawasan. Untuk mewujudkan hasil pembangunan prasarana dan sarana yang berkualitas, berfungsi baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan. Sesuai dengan tujuan umum dari pembangunan prasarana dan sarana adalah pengembangan kemandirian masyarakat melalui kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa atau antar desa serta peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan. Sebelum kegiatan dimulai TPK mengundang seluruh masyarakat untuk mengikuti musyawarah desa dalam persiapan pembangunan jenis kegiatan yang perlu diusulkan sesuai dengan usulan dalam musyawarah desa diusulkan ke UPK.

Realisasi Penyaluran Dana Pembangunan Prasarana dan Sarana Tahun 2013

No	Jenis Kegiatan	JUMLAH DANA			Jumlah
		Alokasi	Operasional TPK 3%	Operasional UPK 2%	
1	Tangga Tepian	44.045.000	1.390.000	920.000	46.355.000
2	Saluran Drainase	206.940.000	6.350.000	4.350.000	217.820.000
TOTAL :					264.175.000

Sumber: Data dikelola

Dari data diatas telah kita ketahui bahwa pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana sangat besar dan dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan tangga tepian dengan volume 1 unit dan saluran drainase (parit) 300 meter pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp 264.175.000. Proses pencairan dana BLM PNPM-MP cukup memakan waktu yang lama untuk diproses sehingga harus menunggu pencairan dari pusat ke daerah sebelum dicairkan ke masing-masing desa.

pemberdayaan dibidang pembangunan prasarana dan sarana mulai dari tahap perencanaan, pengajuan proposal hingga tahap pembangunan di laksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dibidang prasarana dan sarana fisik hal ini tidak lepas dari peran KSM dan UPK yang memperjuangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan sejumlah informan mengenai faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu maka penulis menyimpulkan hasil wawancara tersebut. Yang menjadi faktor pendukung adalah partisipasi masyarakat atau antusiasnya masyarakat terhadap kegiatan dalam menjalankan program serta mendukung terlaksananya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang diprogramkan pemerintah serta memiliki kesadaran yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya bentuk swadaya dan gotong royong masyarakat secara nyata dalam pelaksanaan kegiatan dan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program yaitu pemahaman masyarakat yang masih kurang terutama pemahaman dibidang elektronik dan tingkat pendidikan yang sangat rendah, maupun letak geografis Desa Noha Boan yang berada jauh di penghujung sungai mahakam sehingga menghambat dalam pemasokan bahan-bahan material dari pusat kota ke desa, dimana Desa Noha Boan merupakan Desa yang termasuk Desa Pedalaman.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu sudah terlaksana yang disalurkan melalui dua program kegiatan yaitu program kegiatan simpan pinjam perempuan dan program pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sudah cukup efektif meskipun belum maksimal sesuai yang diharapkan.

Sedangkan saran yang dapat diberikan adalah 1). Untuk kinerja kedepannya perlu ditingkatkan lagi sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP jangan sampai amanah yang dititipkan disalah artikan sehingga tujuan dari PNPM-MP yang sasarannya adalah masyarakat miskin secara tepat dan jelas. 2). Perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak pelaksana, baik dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa sehingga tidak terjadi hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan. 3). Bagi Tim Koordinasi pelaksana PNPM sebaiknya melakukan pertemuan rutin dalam mensosialisasikan program PNPM-MP kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu lebih memahami makna dari program PNPM-MP dan dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP.

Daftar Pustaka

Departemen Dalam Negeri. 2004. PPK Fase II. Jakarta : Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan

- Departemen Dalam Negeri. 2007. PTO PNPM-PPK. Jakarta : Tim Koordinasi PNPM-PPK
- Ivancevich, Jhon M., Robert Konopaske dan Michael T. Matteson. 2007. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Jayadinata, J.T & Pramandika, I.G.P. 2006. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. Bandung : ITB
- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia. Jakarta. 1992.
- Munir, H Dasril dkk. 2004. *Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Sigit, Soehardi. 2003. *Esensi Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: BPFE Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Steers, M. Richard. 1982. *Efektivitas organisasi*. Jakarta : Erlangga
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan & Pekerja Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa : Menanggulangi Angka Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Suriadi, Agus. 2005. *Diktat Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat Medan : FISIP USU*
- Tampubolon, P. Manahan. 2008. *Perilaku Keorganisasian*. Bogor: Ghalia Indonesia

Sumber Internet:

- (http://www.smeru.or.id/report/research/pnpmrural/pnpmrural_ind.pdf (diakses pada 15 Juni 2013, pukul 19.00 WITA hal 27).
- <http://www.Pnpm-mandiri.Org>. (diakses pada 15 Juni 2013, pukul 19.00 WITA).